

## Kelas Menengah Indonesia Tinjauan Kepustakaan

Walaupun pembicaraan kelas menengah Indonesia begitu gencar, tetapi kelihatan-nya masih belum terungkap dengan jelas siapa yang dimaksud mereka itu. Kepustakaan tentang kelas menengah yang ada selama ini, khususnya Pustaka Indonesia, dikelompokkan dalam 4 persoalan; yakni (1) empirik; (2) konseptual-teoritik; (3) epistemologis; dan (4) diskursif.

Ariel Heryanto

Pengajar pada Universitas Kristen

Satya Wacana



Ariel Heryanto, lahir di Malang, pada 1954; lulus sebagai sarjana pada Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (1980), dan meraih gelar Master of Arts pada bidang Asian Studies di University of Michigan, Ann Arbor (1984); kini mengajar pada Departemen Mata Kuliah Umum dan Program Pasca Sarjana, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

DASAWARSA 1980-an merupakan dasawarsa sadar-diri kelas menengah Indonesia. Kelas ini tidak saja menampikan diri secara menonjol dalam bergaya hidup, tetapi sebagian darinya asyik memperbincangkan identitas kelas-menengah-annya. Intensitas dan frekuensi berbagai diskusi dan publikasi oleh, untuk dan tentang *kelas menengah Indonesia* belum pernah segenar dasawarsa ini.<sup>1</sup> Namun masih belum jelas benar (si-)apa yang dimaksud dengan kelas menengah (Indonesia) itu.

Tulisan ini tak mengajukan suatu rumusan konseptual dan teoretik tertentu sebagai unggulan konsep dan teori terbaik. Yang akan disajikan ialah sejumlah persoalan fundamental yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan rumusan konseptual dan model teoretik yang lebih handal daripada yang kini tersedia bagi kita. Semoga bahasan yang lebih *reflektif-analitik* ketimbang pragmatik-instrumental ini bermanfaat bagi usaha-usaha eksploratif lebih lanjut berjangka-panjang.

Sebagai sebuah kajian pendahuluan, tulisan ini bertolak dari studi kepustakaan. Sebagai kajian yang masih jauh dari predikat utuh dan mendalam, di akhir tulisan ini dilampirkan sebuah daftar pustaka tentang kelas menengah Indonesia yang sementara ini terhim-pun. Daftar itu dilampirkan dengan maksud agar dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang berminat melanjutkan

<sup>1</sup> Lihat daftar-daftar terlampir; dari 63 Pustaka Indonesia tentang kelas menengah Indonesia, hanya satu yang terbit sebelum dasawarsa ini.

dan memperbaiki usaha-usaha seperti yang saya kerjakan saat ini.

Untuk keperluan diskusi di sini, daftar pustaka tersebut saya bagi dalam tiga bagian. Pertama, *Pustaka Indonesia*, merupakan publikasi oleh orang Indonesia, untuk publik di Indonesia, dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Kedua, *Pustaka Asing*, khasanah tulisan oleh orang Indonesia atau asing, dipublikasikan di luar Indonesia dalam bahasa asing, dan ketiga, *Lain-lain*, berisi beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik bahasan kita, namun tidak termasuk dalam kategori pertama dan kedua. Misalnya, tulisan orang asing tapi dipublikasikan di Indonesia dan dalam bahasa Indonesia, atau tulisan orang Indonesia di Indonesia, berbahasa Indonesia, tentang kelas menengah asing.

Fokus perhatian untuk pembahasan di sini ialah, Pustaka Indonesia. Saya akan mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dianggap paling umum atau genting dari Pustaka Indonesia, dan hanya sebagian saja dari Pustaka Indonesia tersebut yang akan saya acu untuk memberikan ilustrasi penjelasan. Pemilihan pustaka untuk acuan didasarkan pada tujuan tulisan ini, bukan berdasarkan nilai intrinsik pustaka itu sendiri. Dengan sengaja saya akan mencoba bersikap sekritis mungkin terhadap Pustaka Indonesia, bukan dengan niat menjelek-jelekkan penulisnya tapi dengan sebuah harapan positif. Saya berharap kritik yang memeras dasar persoalannya seekstrem mungkin akan membantu upaya kita membangun konsep dan wawasan teoretik alternatif yang lebih terandalkan.

### Empat Kelompok Persoalan

Berbagai pertanyaan dapat diajukan untuk memperjelas pengertian kelas menengah Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak saja beraneka ragam dalam hal substansinya, tetapi juga tingkat atau bidang permasalahannya. Kita akan kebingungan oleh berbagai pertanyaan itu seandainya tidak terlebih dahulu membedakan jenis dan tingkatnya, sehingga jelaslah hubungan di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Di bawah ini diajukan empat

kelompok persoalan pokok, dan beberapa contoh pertanyaan dalam masing-masing kelompok. Keempatnya diajukan di sini bukan karena *secara obyektif* hanya ada empat persoalan pokok ini, juga bukan karena keempatnya tampil terpisah-pisah dalam realita. Keempatnya diusulkan di sini karena dianggap cukup memadai dan relevan untuk keperluan tulisan ini belaka.

Pertama ialah kelompok persoalan empirik, dengan pusat perhatiannya ialah tentang persoalan-persoalan siapa saja dalam masyarakat kita saat ini yang tergolong kelas menengah. Kemudian sejarah mereka dari masa ke masa, seberapa besar jumlah mereka, berapa besar penghasilan mereka, di mana mereka tinggal dan bekerja, bagaimana gaya hidup mereka, apa saja tingkah-laku politik atau ekonomi mereka, dan bagaimana hubungan mereka sesama kelas atau kelas yang lain.

Kedua, persoalan-persoalan konseptual-teoretik, yaitu persoalan merumuskan pengertian kata-kunci *kelas menengah (Indonesia)* yang jelas dan menyusun suatu kerangka teoretik yang melandasinya, sehingga konsep itu dapat dipakai dalam kajian teoretik yang mendalam dan sekaligus menjadi komponen penting untuk pengembangan kerangka teori itu sendiri. Secara rinci, yang dipertanyakan ialah apa yang dimaksud dengan *kelas* dan *menengah*. Apakah *kelas* sama dengan *golongan*, atau *lapisan*, atau *kelompok*? Kalau ya, apa batasannya. Apa signifikansi sosialnya? Kalau lain, apa bedanya? Benarkah kelas menengah berada di antara dua atau lebih kelas sosial yang lain? Kalau tidak, mengapa kelas ini disebut menengah? Kalau ya, apa saja kelas-kelas lain yang tidak menengah itu? Di mana batas pemisah antara kelas-kelas itu dengan kelas menengah? Jadi, jika dalam pembahasan empirik kita mempersoalkan kenyataan historis maka pembahasan konseptual-teoretik mempersoalkan makna kata *kelas menengah* dan signifikansi sosialnya.

Ketiga, kita berurusan dengan persoalan jenis lain yang dapat disebut kelompok persoalan epistemologis. Persoalannya di sini bukan sekedar kejelasan



rumusan konsep *kelas menengah* dan kemampuan kerangka teori yang melandaskannya, tetapi hakikat konsep itu sendiri. Kita mempersoalkan *makna*nya *makna-kata*. Jadi ini setingkat lebih abstrak dan sekaligus fundamental daripada persoalan konseptual-teoretik. Yang dipersoalkan bukan lagi apa rumusan makna kata *kelas menengah* yang memuaskan, tetapi benda macam apakah *kelas (menengah)* itu? Apakah itu, misalnya saja, merupakan :

(a) suatu benda atau kenyataan obyektif yang keberadaannya tidak ditentukan oleh kesadaran manusia, termasuk anggota kelas menengah itu sendiri? Juga tidak ditentukan oleh bahasa (makna-kata) yang merumuskan konsep dan kerangka teoretik peneliti?; bagaimanakah proses terbentuknya dan bagaimana proses perubahannya? Ataukah

(b) tak lebih dari suatu konstruksi ilmiah yang abstrak dan dibikin di atas kertas belaka, sebagai alat untuk keperluan analisis para pengkaji masalah sosial?; Apakah alat analisa ini netral? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses terbentuknya dan pemakaian alat analisa itu? Ataukah

(c) semacam *folk category* atau *folk model*, yakni kategori subjektif yang diyakini dan diamalkan sendiri oleh anggota sosial yang diacu oleh kategori itu?; Ataukah

(d) suatu entitas metafisis yang esensinya bersifat transendental dari keberadaan duniawi nyata di alam ini, berada di luar sejarah manusia, walau eksistensinya sewaktu-waktu dapat terwujud di dunia ini?

Akhirnya, kelompok persoalan keempat yang ingin saya ajukan ialah persoalan *diskursif*. Terlepas dari fakta

2 Kategori aliran (santri-abangan-priyayi), yang pernah menjadi klasik dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia dan di antara ahli tentang Indonesia, menurut analisa Joel S. Kahn tak lebih dari *folk model* yang telah mengecoh banyak ahli. Lihat Joel S. Kahn, "Ideology and Social Structure in Indonesia", *Comparative Studies in Society and History*, 1978, hal. 103-122, juga dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin (eds.), *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debates*, Ithaca Cornell Modern Indonesian Project, 1982: 92-103.

empirik, rumusan konsep dan kerangka teori, serta pandangan epistemologis yang kita pilih atau miliki, entah jelas atau kabur, *kelas menengah (Indonesia)* itu telah nyata-nyata menjadi topik dan bahan perbincangan. Kajian diskursif meneliti signifikansi sosial dari perbincangan ini; siapa yang terlibat, kapan, bagaimana, mengapa, dan sebagainya.

Pengelompokan empat jenis persoalan — dan nama untuk setiap kelompok — yang diuraikan hendaknya diterima tidak lebih dari sebuah usulan awal yang perlu dikaji ulang dan disempurnakan lebih lanjut. Kegunaannya hanya bisa diuji lewat pemakaian dalam pembahasan seperti berikut ini.

### Pustaka Indonesia: Kiblat Empirik

Sebagian terbesar dari kajian tentang kelas menengah Indonesia mencurahkan perhatian utamanya pada pokok-pokok persoalan empirik. Ini berlaku untuk ketiga jenis pustaka, tapi menonjol pada Pustaka Indonesia. Hanya sebagian kecil yang menyinggung persoalan konseptual-teoretik, biasanya tanpa niat serius untuk mendalaminya. Yang menarik, ada satu dari Pustaka Indonesia yang berminat pada persoalan diskursif (Subangun, 1986). Namun dapat dikatakan tak ada perhatian sama sekali pada problematika epistemologis yang mau tak mau akan mengendap pada setiap kajian. Untuk jelasnya berikut ini akan kita kaji problematika keempat kelompok persoalan yang hadir dalam Pustaka Indonesia.

Kita mulai dengan persoalan-persoalan empirik. Beberapa Pustaka Indonesia<sup>3</sup> menyajikan sejumlah temuan empirik kuantitatif, khususnya mengenai gaji, gaya hidup, serta tingkat dan jenis konsumsi kelas menengah Indonesia. Bobot validitas dan reliabilitas temuan mereka, atau pun implikasi dari temuan-temuan itu tak akan dipersoalkan

3 Misalnya, Kompas (1986b; 1987), Remi (1986), dan Tempo (1986). Sumber asing untuk sumbangan berupa kajian empirik kuantitatif mengenai kelas menengah Indonesia dapat dijumpai pada beberapa peneliti dari Australia, misalnya Crouch (1985), Mackie (1989), Robison (1986), dan Young (1989).

di sini. Di tengah miskinnya pustaka tentang kelas menengah Indonesia, jelas pustaka mereka merupakan sumbangan yang penting, walau temuan mereka tak boleh diambil-alih sembarangan untuk pembahasan makro, untuk memahami kompleksitas persoalan, apalagi merumuskan kesimpulan berjangkau luas.

Sebagian besar pustaka lainnya memusatkan perhatian pada kajian empirik kualitatif, misalnya mengenai dinamika historis kelas menengah Indonesia.<sup>4</sup> Biasanya lingkup bahasan mereka maha besar, dan semua itu disajikan secara superpadat dan supersingkat dalam sebuah karangan yang terbatas ruangannya. Akibatnya, hanya garis-besar perkembangan empirik kelas menengah Indonesia atau garis-besar opini pembahas yang mendapat tempat. Sejauh ini memang belum ada sebuah buku pun yang khusus membahas kelas menengah Indonesia. Sebagian besar Pustaka Indonesia berupa artikel pendek untuk koran, atau makalah seminar yang mungkin ditulis dengan tergesa-gesa untuk mengejar batas waktu penyerahan. Kalau pun akan muncul sebuah buku tentangnya, maka dapat diduga buku itu berupa kumpulan karangan/makalah yang ditulis beberapa orang dengan pandangan dan perhatian berbeda-beda.<sup>5</sup>

Apa yang disebutkan hanyalah sebagian dari sosok yang menonjol pada pembahasan empirik dalam Pustaka Indonesia. Sejarah, gaya hidup dan peri-

4 Lihat misalnya Bulkin (1984), Denny JA (1989), Kuntowijoyo (1985; 1986), Lubis (1986), Muhaimin (1984), Oetomo (1989), Soetrisno (1984), dan Tjahjono (1986), Rahardjo (1985).

5 Dalam waktu dekat akan terbit buku suntingan Kenneth Young, Daniel Lev dan Richard Tanter berjudul *The Politics of Middle Class Indonesia* yang diberi tahun penerbitan 1989 (lihat lampiran). Bekerjasama dengan Kelompok Studi Pena, pada tahun 1987 Lembaga Studi Rekayasa juga pernah berniat menerbitkan sebuah buku *Golongan Menengah dan Pembangunan Nasional Indonesia*. Saya berterima kasih kepada Ken Young atas kesempatan memeriksa naskah calon buku yang pertama, dan kepada Arief Budiman untuk beberapa makalah bagi calon buku kedua. Jadi himpunan tulisan tentang kelas menengah Indonesia yang kita miliki sejauh ini baru edisi khusus dalam jurnal seperti *Prisma* (Th. XIII, No. 2; 1984), dengan thema pokok "kelas menengah baru".

laku kelas menengah Indonesia sudah banyak dibicarakan, diukur dan dihitung secara kuantitatif. Tetapi apakah orang-orang Indonesia yang dibicarakan itu memang kelas menengah? Apakah yang dimaksud dengan kelas menengah dalam Pustaka Indonesia? Di sini kita mulai berhadapan dengan suatu wilayah luas yang penuh tantangan. Banyak pembahas dalam Pustaka Indonesia berpang-long-lebar mempersoalkan kelas menengah Indonesia pada tingkat empirik tanpa pengertian (atau perduli pada pentingnya pengertian) yang jelas mengenai apa yang dimaksud si pembahas dengan kelas menengah Indonesia. Apa gunanya setumpuk data empirik tentang kelas menengah Indonesia, jika tidak pernah ada kejelasan atau minat memperjelas apa artinya kelas menengah Indonesia itu? Bagaimana data empirik itu dapat dicari dan ditemukan jika belum ada konsep kunci dan kerangka dasar yang memungkinkan keberadaannya?

### Pustaka Indonesia: Kekaburan Konseptual

Ingin ditegaskan bahwa menurut pandangan saya tidak hanya ada satu konsep atau teori untuk kajian kelas menengah Indonesia yang dapat dianggap sah, tepat, atau baik. Pernyataan ini tidak mengatakan semua/sembarang konsep atau model teoritik sama saja nilainya. Sangatlah keliru jika kita berpegang teguh pada sebuah konsep atau model teoritik dan menilai semua konsep serta model yang lain salah atau dapat diabaikan. Sama kelirunya jika kita menganggap remeh perlunya memilih dan mempertajam konsep dan kekuatan analisis sebuah model teoritik. Kritik yang diajukan pada Pustaka Indonesia, kurangnya perhatian/kesungguhan menajamkan konsep dan kerangka teori. Bukan karena mereka tak setia pada konsep dan teori tertentu.

Banyak, walau tak semua, dari Pustaka Indonesia yang mengkonsepsikan kelas menengah Indonesia sebagai kelompok sosial berdasarkan penghasilan dan/atau profesi. Tidak sedikit yang mendasarkan konsepsinya pada tingkat dan pola konsumsi atau gaya hidup. Ka-



dang-kadang indikator penggolongan kelas menengah itu diambil secara mandiri, kadang-kadang secara campuran. Pandangan konseptual demikian sangat populer dan tidak dapat langsung diabaikan apalagi kalau diajukan dengan landasan teoretik yang disusun secara mendalam. Namun, sayangnya konsep-konsep tersebut biasanya dipakai secara longgar dan serba implisit, tanpa pengolahan yang memadai dan sistematis untuk dihadapkan pada kompleksitas persoalan yang dibahas.

Kesulitan terbesar dari konsep-konsep itu ialah kaburnya batas kelas menengah dan beraneka-ragamnya anggota kelas itu.<sup>6</sup> Misalnya pada perbedaan tingkat penghasilan, muncul sejumlah persoalan: (a) tidak ada alasan mengapa harus dibagi jadi 3 tingkatan atas-tengah-bawah, dan tidak berpuluh-puluh tingkatan; (b) sedemikian besarkah kesenjangan antara bagian atas dari suatu tingkatan menengah dengan bagian bawah dari suatu tingkat atas jika dibandingkan dengan kesenjangan antara bagian bawah dari tingkat menengah dengan bagian atas dari tingkatan bawah?; (c) banyak orang yang sama bisa menduduki tingkat penghasilan yang berbeda-beda dalam waktu yang relatif singkat; (d) tingkat penghasilan seseorang mungkin ikut berpengaruh, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan tingkat atau pun corak kekuasaan politisnya, ideologi, orientasi sosial, atau gaya hidup dan selera budayanya — artinya tidak menentukan pada kelas sosial mana dia berada. Banyak pengusaha senior keturunan Cina di Jawa yang gaya hidupnya dilambangkan oleh kaos singlet dan sandal jepit yang dipakai sehari-hari walau penghasilannya bisa digolongkan atas atau menengah. Sedang otoritas politisnya hampir nol akibat sejarah rasialis yang panjang dan tak dapat diubah oleh hartanya.

Kesulitan serupa muncul jika indi-

6 Tak ada satu pun kelas atau golongan, lapisan, atau kelompok sosial yang secara mutlak jelas dan homogen. Jadi kekaburan/kejelasan dan ke(se)ragaman yang kita persalkan disini bersifat relatif kontinum. Yang kita upayakan ialah penggolongan sosial dengan tingkat relatif kejelasan dan tingkat keseragaman sebesar mungkin dari kemungkinan-kemungkinan yang ada.

kator profesi digunakan untuk mengkonsepsikan kelas sosial. Di setiap profesi yang biasa digolongkan sebagai kelas menengah terdapat tingkatan-tingkatan otoritas dan penghasilan — selain kemajemukan ideologis — yang sangat besar, sehingga mereka yang se'profesi' dalam bidang kerja non-manual tidak dengan sendirinya merasa sesama kelas menengah. Hal ini lebih serius dalam konteks Indonesia, di mana jabatan dan profesi formal tidak selalu dicapai melalui seleksi kompetitif berdasarkan kualitas pendidikan dan/atau pengalaman kerja yang bersangkutan. Seringkali hal itu tercampur-aduk antara kompetensi individual, koneksi primordial dan politis serta identitas etnik, agama, usia, dan jenis kelamin yang bersangkutan. Bukan tak ada benarnya jika Jamie Mackie (1984) membalik argumen klasik Marxisme bahwa di Indonesia bukannya harta material yang mendatangkan kekuasaan politik tetapi kekuasaan politiklah yang mendatangkan harta material. Menurutny, di sepanjang sejarah Indonesia politik adalah panglima.

Gaya hidup, tingkat dan pola konsumsi seringkali diacu dalam Pustaka Indonesia untuk mengkonsepsikan kelas menengah Indonesia. Dalam pustaka klasik ilmu sosial pandangan begini dilambungkan oleh Weber. Dalam Pustaka Asing, pandangan ini diorbitkan oleh terbitnya artikel Howard Dick (1985) yang kemudian diambil-alih oleh Dede Oetomo (1989) untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa kelas menengah Indonesia. Dick sendiri merevisi pandangan awalnya dalam seminar tentang kelas menengah Indonesia di Australia 1986 (Dick, 1989). Menurut kajian saya konsep Dick sangat lemah, walau observasi empiriknya seperti juga karya Dede sangat berharga. Karena di sini bukan tempatnya mengajukan uraian kritik terhadap pandangannya, maka yang dapat disebutkan hanya pokok-pokoknya saja.<sup>7</sup> Pertama, uraian Dick diwar-

7 Kritik lain terhadap pandangan teoretik Howard Dick dapat dijumpai pada makalah Richard Robison (1989b). Hampir seperempat abad yang lalu karya teoretik Nicolaus tentang kelas menengah

naik kecenderungan orientalisme. Apa yang disebutnya kelas menengah Indonesia diperlakukan tidak saja sebagai obyek bahasan yang pasif, tetapi juga dibentuk oleh jalan-berpikir si pembahas. Kedua, dalam model teoretik Dick,<sup>8</sup> kelas menengah diidentikkan dengan kelas borjuis dan/atau golongan sosial yang paling atas (paling kaya, paling berkuasa, paling bergaya) akibatnya istilah *menengah* jadi membingungkan. Ketiga, batas-batas kelas menengah ini sama sekali tidak jelas, walau Dick sudah berusaha membandingkannya dengan kelompok yang disebutnya *rakyat* (jelata). Apa yang dianggap menyatukan anggota kelas menengah ini adalah gaya hidup, nilai, dan sikap hidup. Tapi pada saat yang bersamaan hal-hal itu dikatakan telah menyebar dan menjadi kebudayaan nasional.

Menurut pengamatan saya Pustaka Indonesia pada umumnya mengidap tiga ciri dan sekaligus cacat yang saling berkait dan sulit untuk dipilah-pilah sebagai problema konseptual-teoretik, empirik, epistemologis, atau diskursif saja. Akan celaka lagi, jika benar pengamatan saya bahwa hampir-hampir tak ada perhatian terhadap problematika konseptual-teoretik ini. Saya akan menguraikan ketiga ciri itu satu per satu. Beberapa pustaka yang sadar dan peka terhadap problematika ini dan merupakan perkecualian minim dari Pustaka Indonesia akan saya sebut seperlunya.

Pertama, para pengamat Indonesia biasanya tak memberikan pandangan yang tegas dan memadai bukan saja apakah yang mereka maksud dengan kelas menengah Indonesia, tetapi juga adakah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai kelas menengah Indonesia. Persoalannya bukan tidak adanya kesepakatan di antara satu pembahas dengan pembahas yang lain, tetapi dari seorang individu pengamat sendiri bisa muncul

sebagai kelas konsumen diperhitungkan para ahli di Barat; untuk uraian kritis terhadapnya lihat Abercrombie dan Urry, *Capital, Labour and Middle Classes*, London: George Allen & Unwin, 1983 68.

8 Dick sendiri mengaku menggunakan istilah *kelas menengah* dalam pengertian umum/awam, bukan konsep yang dilandaskan pada suatu kerangka berpikir teoretis dari ilmu-ilmu sosial.

kontradiksi demikian. Seringkali mereka mengatakan tidak ada kelas menengah Indonesia pada masa ini, tetapi pada saat yang sama mereka juga mengatakan kelas menengah Indonesia pada masa ini kurang begini atau begitu, terlalu ini atau terlalu itu. Jadi seakan-akan kelas menengah Indonesia itu ada tapi mengecewakan. Kontradiksi demikian merajalela dalam Pustaka Indonesia, dan hampir tak pernah dipersoalkan, dan kalau pun ada yang sadar serta berusaha menghindari, maka pemecahan yang biasa ditempuh ialah dengan mengatakan bahwa *tidak ada* kelas menengah Indonesia *dalam arti yang sesungguhnya*. Implikasinya, yang ada di Indonesia hanyalah kelas menengah gadungan. Yang ada di Indonesia tidak dirumuskan secara positif ('mereka adalah . . .'), namun negatif ('mereka tidak/bukan . . .').

Ciri dan sekaligus cacat kedua dalam Pustaka Indonesia erat berkaitan dengan yang pertama tadi, yakni suatu obsesi mengenai *peran* yang diharapkan dari kelas menengah Indonesia. Kelihatannya, secara seragam para penyumbang Pustaka Indonesia bersepakat bahwa *peran yang sesungguhnya* dari kelas menengah ialah mandiri secara ekonomi dan politik, memperjuangkan demokrasi bagi seluruh masyarakat. Singkatnya, kelas ini diharapkan menjadi pembaru yang progresif, perubah tata masyarakat, dan pihak yang memimpin usaha melawan arus jaman. Dengan demikian, analisa ilmiah para penyumbang pustaka Indonesia ini jelas ditunggangi sikap normatif, walau tak diakui demikian secara eksplisit.

Mereka berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada kelas menengah atau tidak ada kelas menengah dalam arti yang sesungguhnya karena mereka tidak mendapati kelompok sosial yang dapat memuaskan harapan normatif mereka. Menarik untuk dikaji lebih lanjut, darimana datangnya *penyeragaman* gagasan normatif di kalangan sarjana ilmu sosial kita itu. Menurut pengakuan mereka, apa yang dimaksudkan dengan kelas menengah *sejati* atau *dalam arti yang sesungguhnya* ialah kelas menengah di Barat, tetapi mungkin kita masih harus buru-buru menambahkan



bahwa itu adalah kelas menengah di negeri-negeri Barat sebagaimana diasumsikan oleh para pembahas Indonesia ini. Sayangnya, asumsi itu tak lagi diuji kebenarannya; apakah fakta sejarah, fantasi, atau mitos belaka.

Sejauh yang dapat saya amati, perdebatan tentang kelas menengah pada abad ini di kalangan cendekiawan Barat tidak dibayang-bayangi oleh fantasi adanya kelas menengah sebagaimana yang dihayalkan para penulis Indonesia itu. Tegasnya, para cendekiawan di Barat pada umumnya tidak menokohkan kelas menengah dalam masyarakat mereka sebagai pahlawan. Hal ini mungkin agak berbeda pada beberapa ahli asing yang berspesialisasi pada kajian tentang Indonesia, dan punya kecenderungan sikap etnosentrik. Umumnya para sarjana Barat tidak menganggap kelas menengah dalam masyarakat mereka sendiri sebagai pihak yang mandiri, pejuang demokrasi atau revolusioner. Kalau pun ada anggapan demikian di kalangan sarjana Barat, maka biasanya anggapan itu ditimpali dengan penilaian yang sebaliknya pula.<sup>9</sup> Jadi, keluhan-keluhan para sarjana Indonesia tentang kelas menengah Indonesia yang diukur dengan suatu fantasi ideal agak ganjil dan mencurigakan. Kita akan kembali mempersoalkan ini sebagai persoalan diskursif nanti.

Ciri ketiga yang tampak dari sebagian tak kecil dari Pustaka Indonesia ialah menonjolnya pandangan teknokratis; bahwa kelas menengah Indonesia merupakan sesuatu yang dapat direkayasa dan dibikin (oleh elit politik dan teknokrat) jika diinginkan. Tidak hanya satu yang berpandangan bahwa kelas menengah merupakan, semacam alat

atau instrumen bagi Pembangunan. Sedangkan alat itu sendiri dapat dan perlu dibangun. Karena itu ungkapan *membangun kelas menengah Indonesia* menjadi bagian yang sangat penting dari pembahasan Pustaka Indonesia.<sup>10</sup> Walaupun saya berpendapat bahwa suatu kelas sosial bukan sekedar ada secara tiba-tiba, atau jatuh dari langit, atau takdir, akan tetapi saya kira agak berlebihan jika dikatakan bahwa ada atau tidaknya suatu kelas menengah Indonesia tergantung pada kehendak, keputusan komitmen, dan buah tangan elit Indonesia.

Pustaka Indonesia mempunyai kemajemukan ciri dan nuansa yang tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi tiga ciri sebagaimana diuraikan. Perkecualan tentu ada. Selanjutnya, juga tidak setiap karya Pustaka Indonesia tentang kelas menengah mempunyai ketiga ciri tersebut sekaligus dalam kadar merata. Identifikasi ketiga ciri itu hanya menunjukkan ciri-ciri dominan Pustaka Indonesia secara keseluruhan. Untuk memuaskan mereka yang membutuhkan contoh konkrit, beberapa acuan berikut ini dapat dipertimbangkan.

Kesimpulan sebuah artikel mengenai kelas menengah Indonesia berikut ini menyajikan ungkapan yang agak khas dari banyak ulasan lain tentang adakalanya kelas menengah Indonesia:

"Secara teoretis, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia pascakolonial tidak memiliki suatu kelas menengah di dalam artian yang sebenarnya, yaitu satu kelompok manusia Indonesia yang benar-benar merdeka dalam pandangan politik dan memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan menentukan. Dari segi ini maka golongan menengah yang diciptakan oleh pemerintah Belanda yaitu *pariah kapitalist* dan kelas birokrat dan intelektual bukanlah satu kelas menengah yang murni."<sup>11</sup>

10 Tentang *Pembangunan-isasi* tata berpikir-berucap di Indonesia, silahkan tengok artikel saya, "Berjangkitnya Bahasa-bangsa di Indonesia", *Prisma*, Th. XVIII, No. 1, khususnya hal. 13-16, juga terjemahan Nancy Lutz atas makalah saya yang lain, "The Development of 'Development'", *Indonesia*, No. 46/October, 1988, hal. 1-24.

11 Loekman Soetrisno, "Pergeseran dalam Golongan Menengah di Indonesia", *Prisma*, Th. XIII, no. 2, Februari 1984, hal. 25.

Seakan-akan di dunia ini ada kategori sosial yang *murni* dan *palsu*. Persoalan yang muncul bukan lagi sekedar rumusan yang jelas dan handal untuk pengertian kelas menengah, tetapi juga sudah memasuki persoalan epistemologis. Sedangkan ada kelas menengah yang "... benar-benar merdeka dalam pandangan politik dan memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan menentukan", benarkah mereka merupakan kelas menengah dalam artian yang sebenarnya atau lebih benar daripada artian lain? Hal-hal ini tak pernah dipertanyakan dan diulas. Tampaknya apa yang dimaksudkan *benar* dan *murni* oleh para pembahas seperti pada kutipan tersebut adalah apa yang dibayangkan terjadi dalam sejarah Barat. Kutipan di atas datang dari penulis yang percaya bahwa sejarah semua bangsa itu mengikuti suatu pola evolusi yang serupa. Masyarakat yang tidak bertumbuh seperti masyarakat Barat adalah masyarakat yang bertumbuh tidak normal:

"... Kolonialisme merupakan faktor sangat penting yang menghambat negara-negara sedang berkembang mengikuti perkembangan evolusioner secara normal."<sup>12</sup>

Semua itu sekali lagi mengingatkan kita betapa erat persoalan empirik historis dengan persoalan-persoalan lain yang bersifat konseptual-teoretik dan epistemologis. Persoalan ideologis baik si pembahas pribadi maupun konteks pembahasannya merupakan wilayah kajian tersendiri yang patut mendapat perhatian. Sebelum kita menginjak pada pembahasan yang berikut, ada dua hal yang perlu ditekankan sekali lagi di sini. Pertama, pustaka yang telah dikutip dan dikritik tersebut hanyalah sepotong dari tulisan yang asli selengkap-lengkapnya. Kritik terhadap kutipan itu bukan penolakan terhadap semua gagasan dalam tulisan itu seluruhnya, atau semua gagasan si penulis (Loekman Soetrisno) yang tersebar di berbagai forum. Kedua, pandangan Loekman Soetrisno yang telah diacu tersebut sama sekali tidak unik dalam Pustaka Indonesia. Kegelisahan tentang kemurnian atau kesejatan kelas mene-

12 Soetrisno, *ibid.*, hal. 23.

ngah Indonesia dapat juga dijumpai pada pembahasan Aswab Mahasin (1984), S. Indro Tjahjono (1986), Hotman M. Siahaan dan Sjahrir (menurut wawancara *Kompas*, 1989d), editorial *Kompas* (1989g), juga Ramles Manampang (1978). Sedang obsesi mengenai peran kelas menengah yang dianggap *seharusnya* menjadi pejuang progresif ke arah demokrasi mewarnai hampir semua Pustaka Indonesia, dan menonjol pada beberapa di antaranya. Silahkan menengok, misalnya; Aswab Mahasin (1986), Benny Subianto (1989), Denny J.A. (1989), beberapa wawancara *Kompas* (1989a; 1989b; 1989c) maupun pandangan dari pengasuh harian itu sendiri (*Kompas*, 1989g; 1989h), Kuntowijoyo (1986), Kustigar Nadeak (1989), T. Mulya Lubis (1986), A. Muis (1988), John S. Nimpoeno (1984), Nurcholis Madjid (1986), Saparinah Sadli (1984), Soetjipto Wirosardjono (1984), Sritua Arief (1986), dan Arief Budiman (1984).

Yang menggembirakan, kepekaan akan kompleksitas persoalan teoretik dan konseptual dalam perbincangan kelas menengah Indonesia, perhatian serta minat untuk menggelutinya sedang bertumbuh di kalangan beberapa sarjana berusia muda kita. Artikel Benny Subianto (1989) dan Denny J.A. (1989) dapat diajukan sebagai contohnya. Sebagaimana akan disinggung sedikit lebih lanjut, mereka masih harus bergelut dengan sejumlah persoalan mendasar yang belum terpecahkan. Namun setidaknya-tidaknya mereka telah dengan sengaja memilih menggalati persoalan konseptual dan teori yang pelik. Persoalan itulah yang endemik dan akut dalam Pustaka Indonesia. Upaya menggelutinya sangat langka dan patut dihargai tinggi-tinggi. Pada generasi kedua pemikir muda itu, kita jumpai orang seperti M. Dawam Rahardjo (1985) yang juga peka dan serius mendalami kajian teoretik tentang pertumbuhan kelas menengah dalam sejarah Indonesia. Sedangkan di antara ahli asing tentang Indonesia, tampaknya Richard Robison (1989b) paling menonjol dalam menggeluti persoalan serupa, walau ia sering terbelenggu oleh strukturalismenya yang kaku dan agak statis.



Konsepsi tentang rekayasa untuk membangun kelas menengah datang dari berbagai pihak dengan maksud dan latar belakang yang tidak seragam. Judul sebuah laporan wawancara *Kompas* (1989e) berbunyi *Pengusaha Keturunan Harus Bantu Ciptakan Kelas Menengah*. Bagi para ilmuwan sosial yang menekuni analisa kelas, judul itu bisa menggelitik, kalau bukan menggelikan. Apa yang dimaksud dengan kelas menengah di situ? Apakah kelas menengah dapat diciptakan sebagaimana orang membikin pabrik, jalan layang, atau pisang goreng? Mengapa *pengusaha keturunan* yang diharapkan membantu menciptakannya? Apakah karena itu merupakan proyek yang butuh dana atau sponsor finansial seperti festival seni, atau lomba olahraga? Atau karena proyek itu berada dalam bidang ekonomi swasta yang kononnya dikuasai pengusaha keturunan?

Lalu apa pula tujuan penciptaan kelas itu? Jawabnya tidak hanya bermacam-macam, tapi banyak yang bertentangan. Perbedaan dan pertentangan itu sendiri tidak selalu disadari atau diperdulikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kelas itu kadang-kadang diinginkan tercipta sebagai *dewa penyelamat* perkembangan ekonomi kapitalistik di Indonesia (yang dibilang *ekonomi nasional*) dalam persaingan pasar internasional. Ini muncul dari beberapa wawancara *Kompas* yang gencar dengan kaum pengusaha dan intelektual *kanan-baru* (*Kompas*, 1989e; 1989f). Sebaliknya, kadang-kadang ada harapan merekayasa kelas menengah sebagai (kuasi-)oposisi untuk mendorong perubahan sosial ke arah demokratisasi (Denny J.A., 1989; Soetrisno, 1986). Ada pula pihak-pihak yang menganggap pembangunan kelas menengah diperlukan negara-bangsa<sup>13</sup> secara keseluruhan, baik sebagai agen modernis industrial, borjuis domestik,

pengaman ketertiban status-quo, atau sekedar kelompok elit konsumen/pel尼克mat hasil pembangunan (*Kompas*, 1989g, 1989g; Nadeak, 1989; Nimpoeno, 1984; Sadli, 1985; Suryohadi-projo, 1986a; 1986b; Nadjdi, 1986; Muhaimin, 1984; Subianto, 1989). Karena itulah tak sedikit yang menganggap pembangunan kelas menengah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Hal itu secara ekstrim menjadi ganjil dalam pemikiran Denny J.A. (1989). Menurut Denny, peran sejati kelas menengah ialah menjadi "kekuatan anti-sistem, yang mendorong perubahan dan pencarian alternatif" Dalam masa Orde Baru, kata Denny, peran kelas menengah Indonesia mengalami *distorsi* karena ditundukkan oleh negara yang super-kuat. Tapi kemudian Denny mengajukan harapan besar bahwa negara yang sama akan mengambil alih peran *progresif* kelas menengah yang dirumuskannya tadi. Implikasinya, Denny mengharap negara mengguntingi kekuasaannya sendiri secara sukarela sesudah negara itu bersusah payah menaklukkan kelas menengah dan membangun legitimasi atas penaklukan itu. Sebagian besar uraian Denny menyajikan pemikiran yang kritis dan radikal. Tapi akhir artikelnya mendorong orang berkesan seakan-akan harapan Denny itu merupakan ilustrasi bagi tuduhannya sendiri:

"negara Orde Baru berkemampuan mengintegrasikan kelas menengah itu ke dalam dirinya. Kelas menengah itu akhirnya menyatukan diri dalam rekayasa sosial besar, dimana negara itu sendiri yang menjadi sponsor utama. Akibatnya, seluruh pola pikir kelas menengah berubah, menyesuaikan diri dengan pola pikir yang direpresentasikan negara Orde Baru."

Kelas menengah dibicarakan Pustaka Indonesia dengan konsep yang sangat berbeda-beda. Perbedaan ini baik dan menyehatkan bagi pertumbuhan intelektual andaikan diterima sebagai bahan dialog kritis dan perdebatan rasional. Tapi justru inilah yang tidak atau belum cukup kelihatan terjadi. Banyak pembicara tampaknya tidak terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Dengan perkecualian minim, masing-masing

tidak mencoba mendalami keunggulan dan kelemahan konsep yang dipakai sendiri atau dipakai orang lain. Beberapa pembahas bahkan memberikan kesan seakan-akan tak pernah kenal konsep *kelas* dalam pustaka klasik ilmu-sosial. Kelas menengah diartikan tidak lebih dari kategori statistik atau tipologi yang statis.

Jadi, walau banyak yang memperbincangkan kelas menengah Indonesia tapi perbincangan itu bagaikan lalu-lintas peluru di medan perang yang tersebar ke berbagai arah, tanpa saling bertatap sapa. Bertambahnya pembahasan belum menjamin *kemajuan* kualitatif pendalaman pemahaman secara bersinambungan. Karena itulah pustaka klasik tentang konsep kelas (menengah) layak dikemukakan, biar pun hanya sepintas sesuai dengan ruangan yang tersisa. Karena tulisan ini tidak dimaksudkan khusus bagi para ahli ilmu sosial yang menekuni analisa kelas sosial, perkenankan saya memberanikan diri mencoba meringkas simplistik konsep kelas (menengah) dari khasanah pustaka klasik yang sangat kaya dan rumit. Pembahasan tentang Pustaka Indonesia kita tinggalkan sejenak, dan akan kita teruskan sesudah ini.

### Pustaka Klasik: Tengokan Sekilas

Keputakaan klasik perlu diketengahkan di sini bukan karena mereka menyediakan jawaban *serba bisa* yang mampu menuntaskan berbagai persoalan kita kini. Berbagai konsep klasik itu sendiri mengidap aneka problematika yang sudah disadari banyak ahli tapi tidak atau belum terpecahkan. Pustaka klasik itu perlu diangkat di sini karena mereka meletakkan dasar-dasar dan sekaligus sejumlah pagar diskursif yang mewarnai perbincangan orang tentangnya pada masa kini. Mereka juga mewariskan puncak-puncak pemikiran tentang problema yang sama, serupa, atau bersinambungan dengan yang kini kita hadapi. Kita yang awam dalam kajian analisa kelas perlu mempertimbangkan dan memanfaatkan tanpa harus setuju pustaka klasik itu, sedang mereka yang ahli biasanya enggan men-

jelaskan hal-hal yang mendasar dan elementer itu secara bersahaja. Dengan menimbang pustaka klasik ini, minimal dapat diperjelas mengapa kajian tentang kelas cenderung menarik, mengapa ekonomi-sentrik, dan mengapa kelas menengah sering disamakan dengan kaum borjuis.

Konsep *kelas* merupakan salah satu aliran konsep-kunci dalam salah satu aliran pemikiran dan pendekatan ilmiah yang paling berpengaruh di dunia pada abad ini: Marxisme. Konsep itu telah berkembang secara majemuk di kalangan para teoretikus Marxisme mutakhir. Maka yang dapat dicatat di sini hanyalah beberapa intisari pustaka klasik mereka.<sup>14</sup> Pada intinya, menurut pandangan Marxisme sejarah manusia merupakan sejarah eksploitasi manusia atas manusia lain dan pertentangan di antara dua kelompok besar masyarakat itu yakni, antara kelas penghisap yang berkuasa dan kelas terhisap yang dikuasai. Dalam setiap masyarakat, mungkin kecuali yang primitif, dapat dijumpai mereka yang bekerja produktif tapi hasil kerja, pengorbanan dan penderitaan mereka itu dinikmati secara eksklusif oleh kelompok lain yang non-produktif. Penghisapan manusia atas manusia ini bisa berlangsung mulus secara berabad-abad sebab, menurut Marxisme, berlangsung secara struktural dan disembunyikan dan diabsahkan oleh berbagai kesadaran palsu (ideologi) yang disebarkan kelas berkuasa lewat agama, ilmu, hukum, kesenian, dan sebagainya. Akibatnya, seluruh masyarakat, juga kelas terhisap, terbuai ikut-ikutan melestarikan sistem sosial yang timpang itu.

Marxisme berhasil menarik perhatian banyak orang karena ketajaman analisa ilmiahnya, luasnya lingkup kajiannya, dan rayuan ideologisnya yang menjanjikan penghapusan penghisapan manusia dari satu kelas atas sesamanya dari kelas

13 Analisa tajam dari Benedict Anderson tentang perlunya memilah negara dan bangsa serta menyadari ketegangan di antaranya belum banyak mendapat perhatian dari para sarjana Indonesia. Lihat ulasan Anderson, "Old State, New Society; Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective", *Journal of Asian Studies*, 1983, Vol. XLII, No. 3, hal. 477-496.

14 Untuk kemudahan, berbagai sumber acuan klasik untuk catatan ini tidak dicantumkan secara rinci di sini. Dalam menyusun ringkasan ini saya hanya dibantu oleh tinjauan global dalam buku Abercrombie dan Urry, *op. cit.*, Giddens dan Held (eds.), *Classes, Power, and Conflict: Classical and Contemporary Debates*, Basingstoke: The Macmillan Press Ltd., dan juga Wallerstein, *op. cit.*



yang lain.<sup>15</sup> Keunggulan ini kadang-kadang juga menjadi benih kelemahan-nya yakni sikap terlalu yakin-diri dan terlalu dogmatis, sehingga siapapun yang non-Marxis apalagi anti-Marxis cenderung dianggap buta, atau membutuhkan orang lain terhadap praktek eksploitasi sistematis dalam masyarakat.

Menurut Marxisme klasik, siapa persisnya kelas yang berkuasa/dikuasai, dan apa bentuk kekuasaan yang membedakan mereka itu bisa berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Tapi yang menjadi poros dari semuanya ialah penguasaan alat produksi: misalnya, tanah dalam masyarakat pertanian, dan modal uang/mesin/pabrik dalam masyarakat industri. Menurut Marxisme kepincangan pemilikan dan penguasaan atas alat-alat produksi inilah penyebab utama terbelahnya masyarakat menjadi dua kelas yang saling membenci. Dan perbedaan/pertentangan pada pemilikan alat produksi ini menjadi akar terbentuknya perbedaan dalam hal-hal lain: gaya hidup, alam pikiran, bahasa, penghasilan, perilaku dan status politis, profesi, penghayatan religius, etis, atau pun kesenian.

Analisa kelas sangat memukau banyak ahli ilmu sosial karena sifatnya sebagai penggerak gejala sejarah perubahan dan jangkaan analisisnya meliputi hampir segala aspek kehidupan manusia seutuhnya. Uraian simplistik tersebut juga menjelaskan mengapa hingga kini perbincangan tentang kelas sosial cenderung berkiblat pada dimensi *ekonomi*. Para neo-Marxis telah mencoba menyempurnakan sejumlah cacat dalam pustaka Marxisme klasik yang terlalu dogmatis dan deterministik ekonomi. Dalam uraian sebelumnya dikatakan bahwa, suatu kelas hanya ada karena pertentangan dengan kelas lain. Jadi analisa kelas tidak bisa hanya memba-

has satu kelas sosial secara terpisah dari kelas lainnya. Uraian tersebut juga menjelaskan betapa erat kaitan antara kelas dan penghasilan, tapi keduanya tidak diidentikkan. Bandingkan itu dengan sebagian dari Pustaka Indonesia yang hanya membatasi kelas itu berdasarkan jumlah penghasilan, bukan posisi dalam proses produksi yang membuahkan penghasilan itu. Konsep kelas dalam Pustaka Indonesia beraneka ragam, tapi hampir semuanya merupakan kategori beku yang tak punya watak antagonistik dengan siapa pun, dan tak punya daya dinamis perubahan sejarah. Paling jauh, peran dinamis kelas menengah dalam Pustaka Indonesia adalah *juru selamat*, reformis yang membenahi masyarakat secara sukarela untuk mencapai ketertiban umum.

Yang belum kita singgung ialah tentang kelas menengah. Seperti telah dikatakan, alur pokok pemikiran Marxisme hanya mempersoalkan dua kelas sosial. Walaupun Marx sendiri pernah menyebut tentang kelas menengah tapi ini tidak dianggap cukup penting oleh Marx dan sebagian pengikutnya, karena mereka yakin bahwa golongan yang tidak termasuk salah satu dari dua kelas yang bertentangan lama kelamaan akan terdorong masuk ke dalam salah satu dari dua kelas itu. Mungkin ini salah satu sebabnya, minat dan pembicaraan tentang kelas menengah tidak lagi didominasi atau didominasi oleh kaum Marx.

Bagaimana proses timbulnya kelas menengah dan perbincangan tentangnya? Jawabnya bisa lebih dari satu ragam, tergantung pada kalangan yang memperbincangkan dan perspektif historisnya. Berikut ini hanyalah salah satu versi belaka. Terlebih dahulu perlu diperhatikan pembagian klasik di antara apa yang disebut kelas menengah *lama* dan kelas menengah *baru*. Menurut Marx, dalam masyarakat feodal (Eropa) tata sosial dibentuk oleh adanya dua kelas utama; yakni kaum tuan tanah dan bangsawan (penguasa) dengan petani-budak (yang dikuasai). Memang ada sejumlah pedagang kecil yang tinggal di sekitar kota dan tidak termasuk dalam salah satu dari kedua kelas tadi. Mereka ini dijuluki kaum borjuis

(penghuni *bour*, "wilayah perkotaan"), dan karena perannya kecil dan sosoknya serba kabur (bukan bangsawan, bukan pula petani/budak), pada mulanya mereka tidak terlalu diperhitungkan. Tapi dalam perkembangan sejarah Eropa berikutnya mereka menjadi semakin kaya dan berpengaruh, dan borjuis ini yang kemudian menjadi kelas perantara atau kelas menengah *lama*. Ini sebabnya, hingga kini banyak dari pustaka Indonesia yang menyamakan borjuis dengan kelas menengah walau konteksnya tidak selalu tepat.

Dalam perkembangan berikut (industri kapitalisme) di Eropa, kaum borjuis menanjak ke puncak tata sosial dan menduduki kelas atas. Merekalah yang paling menguasai proses produksi (dan konsumsi) dalam masyarakat, sedangkan yang menduduki kelas bawah adalah kaum buruh/pekerja. Dalam perkembangan mutakhir, tata sosial kapitalis itu menumbuhkan kelas menengah *baru*. Siapa mereka dan mengapa mereka bertumbuh?

Dalam berbagai pustaka klasik yang dimaksud dengan kelas menengah baru adalah mereka yang berpendidikan formal tinggi, berketrampilan, menguasai birokrasi, dan/atau manajer dan profesional penjual jasa. Mereka bukan kapitalis atau borjuis si pemilik modal, tapi pegawai yang digaji si pemilik modal. Dengan demikian mereka lebih mirip dengan kaum buruh ketimbang kelas kapitalis. Pada saat yang sama, mereka berbeda dari kaum buruh yang hanya mampu menjual tenaga kasarnya untuk mempertahankan hidup sehari-hari. Berbeda dari kaum buruh, kelas menengah ini bekerja dengan kondisi-karya yang nyaman, bergaya hidup seperti para pemilik modal, mereka mampu menabung untuk hari depan anak-anak, punya mobilitas tinggi, berpeluang mendaki jenjang karir secara relatif mudah, dan ikut mengendalikan proses produksi. Seperti kelas menengah lama, kelas ini ditandai oleh kekaburan batas dua kelas yang secara teoretis dapat saling dipertentangkan.

Tumbuhnya kelas menengah baru ini seringkali ditafsirkan para ahli sebagai akibat atau jawaban terhadap kebutuhan baru dalam pertumbuhan kapitalis-

me mutakhir. Industri kapitalisme tidak hanya merangsang pertumbuhan teknologi, ilmu dan pendidikan, tapi juga kebutuhan baru. Industri kapitalis yang berkembang tidak bisa menghindari kenyataan tumbang-nya kapitalis kecil, dan semakin mekarnya yang sudah besar. Karena terlalu besar dan rumit, maka kapitalisme yang tersisa dalam persaingan itu tidak bisa lagi dikelola dan dikontrol oleh si pemilik modal secara langsung. Saham terbagi di antara banyak orang, sedang pengelolaan industri yang semakin padat-teknologi dan padat-informasi harus diserahkan kepada kelas menengah baru ini.

Jika kita terima penjelasan seperti dalam versi yang diuraikan tersebut, maka kita tidak bisa menerima konsep kelas menengah berdasarkan pola dan tingkat konsumsi atau penghasilan, atau gaya hidup seperti yang dominan dalam Pustaka Indonesia, walaupun versi klasik tersebut tidak atau belum sepenuhnya *siapa pakai* untuk menjelaskan berbagai realita, juga yang ada di Indonesia. Seperti telah disinggung, kapitalisme di Indonesia tidak benar-benar tunduk oleh rasionalitas industrial, dan kelas sosial yang tumbuh tidak sekedar berporos pada aksis produktif di antara modal dan tenaga buruh. Etnisitas, agama, jenis kelamin, dan usia adalah faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam formasi sosial kapitalisme Indonesia.<sup>16</sup> Karena itulah pikiran-pikiran Weberian — yang sering dipertentangkan dengan pikiran Marx secara berlebihan — perlu mendapat perhatian secara lebih cermat dan kritis. Sayangnya, di Indonesia kini pendekatan Marxian ditabukan, sedang pendekatan Weberian yang masuk dan berkembang

16 Hal ini sudah sering dibicarakan orang. Tapi saya tidak setuju dengan kebiasaan mereka yang menyimpulkan bahwa kapitalisme di Indonesia bukan kapitalisme murni atau dalam arti sesungguhnya, atau *gadungan*. Pandangan yang umum itu tampak dari kebiasaan membubuhkan aneka emblem-julukan di belakang kata *kapitalisme* untuk mengacu kapitalisme di Indonesia. Saya tak mengatakan bahwa kapitalisme di Indonesia sama saja dengan kapitalisme di mana pun. Yang saya tekankan ialah bahwa kapitalisme di Indonesia tidak kurang nyata, sungguhan, atau *sejati* daripada aneka kapitalisme lain.

15 Salah satu versi pendekatan mutakhir tentang kelas ala Marxisme sebagai konsep ilmiah versus sebagai konsep ideologis dapat dijumpai pada penulis buku *Classes* yang sangat tenar itu, Erik Olin Wright, "Reflection on Classes", *Berkeley Journal of Sociology*, Vol. XXXII, 1987, hal. 19-49; bantahan terhadap bahasan itu oleh Michael Burawoy, "The Limits of Wright's Analytical Marxism and an Alternative", *loc. cit.*, hal. 51-72; serta jawaban balik dari Wright, *loc. cit.*, hal. 73-78.



di Indonesia bukan setegar dan seradikal versi aslinya tetapi yang dimasukkan lewat Amerika Serikat setelah disunting dan dikebiri oleh para sarjana liberal pluralis dan struktural fungsional mereka.<sup>17</sup>

### Pustaka Indonesia: Presuposisi Epistemologis

Ringkasan pustaka klasik dalam versi yang telah diuraikan, menyarankan suatu presuposisi tersirat bahwa kelas sosial merupakan suatu kenyataan obyektif. Implikasinya, seakan-akan kita boleh menilainya, menyukainya, menolaknya, atau menyusun sebuah rumusan konseptual macam apa pun juga tentangnya, tapi semua ini tidak mengubah adanya kelas itu sebagai kenyataan obyektif tadi.<sup>18</sup> Obyektivisme demikian sama sekali bukan ciri unik kaum Marxis. Pandangan demikian sangat populer dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia pada umumnya, juga dalam Pustaka Indonesia terlampir. Pandangan ini seringkali didasarkan pada keyakinan atau klaim pengabsah akan adanya obyektivitas ilmiah.<sup>19</sup> Dalam kalangan Marxis, pandangan ini menjadi padanan strukturalisme mereka, bahwa struktur sosial merupakan realita obyektif dan keberadaannya terletak di luar atau mandiri dari kesadaran atau kehendak subyektif manusia.<sup>20</sup> Tapi ini lebih berbobot daripada banyak pus-

taka lain yang menganggap obyektivitas kelas menengah sebagai hal yang sudah dengan sendirinya jelas dan tak perlu dipertanyakan atau diajukan dengan argumen teoretik.

Menurut Benny Subianto (1989) "menunjuk siapa yang tergolong kelas menengah Indonesia adalah jauh lebih mudah daripada coba membuat definisi kelas menengah itu sendiri." Seakan-akan Benny yakin bahwa kelas menengah Indonesia memang ada secara nyata dan obyektif, bisa diamati, atau dituding dengan jari telunjuk, biar pun sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Benny juga berpendapat bahwa muncul atau tidaknya kelas menengah ditentukan oleh ada tidaknya kebutuhan struktural akan kelas itu sebagai kelas konsumen bagi produk kapitalisme dalam masyarakat bersangkutan.<sup>21</sup> Pandangan Benny dapat dibedakan dari beberapa Pustaka Indonesia yang menganggap kelas menengah merupakan  *benda obyektif*  yang sewaktu-waktu dapat diciptakan menurut selera subyektif elit masyarakat.

Contoh ekstrem untuk pandangan epistemologis yang kedua kita jumpai pada tulisan Sukanto (1985) dan Nancy K. Suhut (1985). Bagi keduanya, kelas menengah bukan realita obyektif, tetapi konstruksi ilmiah yang arbitrer untuk keperluan analisa. Ada-tidaknya kelas menengah Indonesia dan jelas atau kaburnya realita itu, serta peran sosial mereka tergantung pada (perse-tujuan) rumusan para ahli. Sukanto (1985: 523) menuliskan kesimpulan di akhir tulisannya sebagai berikut:

"Itu semua menunjukkan bahwa hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat mengenai konsep-konsep ataupun kriteria-kriteria tentang kelas menengah, baik di negara-negara maju maupun di negara kita. Oleh karena itu, untuk mengetahui sekejelas-jelasnya tentang kelas menengah di Indonesia, perlu diadakan penelitian."

Pendapat serupa dinyatakan Nancy K. Suhut (1985: 524) dalam rumusan yang berbeda: "Penentuan anggota kelas dalam masyarakat sulit untuk didefinisikan secara tegas karena adanya

berbagai pendapat dan pandangan yang berbeda-beda." Walau pandangan epistemologis ini dapat dibedakan dari kaum obyektifis, tapi jelas keduanya sama-sama menempatkan diri si pengamat di luar realita yang dijadikan obyek pengamatan. Pemisahan begini pernah jadi bulan-bulanan kritik ilmu-ilmu sosial mutakhir.

Akhirnya perlu juga dipertimbangkan kembali perbincangan tentang *kejelasan* kelas menengah Indonesia yang telah disinggung sebelumnya. Saya curiga, sebagian dari perbincangan ini timbul dari suatu preposisi epistemologis yang meyakini realita atau kebenaran dan kejelasan metafisik transendental. Pandangan epistemologis seperti ini sangat menonjol dalam banyak bahasan tentang etika, politik, kebudayaan dan kesenian Indonesia.<sup>22</sup> Tapi yang paling genting ialah pada pemaknaan gender, nasionalitas dan etnisitas. Perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit makin banyak orang Indonesia yang memper-cayai bahwa tidak ada (*ke-jipria(-an)* dan (*ke-jiwanita(-an)*) yang bersifat *sejati*, karena keduanya hasil bikinan manusia dalam sejarah sosialnya. Tapi masih banyak orang Indonesia yang percaya bahwa *ke-Indonesia-an*, apalagi identitas ras dan kesukuan, sebagai *pemberian* takdir, alamiah-biologis, universal atau transendental, bukan konstruksi sejarah moderen.

### Pustaka Indonesia: Praktek Diskursif

Jika ditengok secara kritis dari segi isi (empirik atau pun konseptual) dan kerangka epistemologisnya, maka Pustaka Indonesia cenderung mengecewakan. Kita tidak mendapatkan banyak pergulatan intelektual yang seru dan

mendalam, disamping itu juga tidak didapatkan banyak gambaran *obyektif* mengenai masyarakat Indonesia yang diperbincangkan sebagai kelas menengah. Jika artikel ini dihentikan di sini, maka yang telah kita terima sejauh ini tidak lebih dari kumpulan kritik getir. Hal ini akan sedikit lain jika kita perhatikan aspek diskursif tentang kelas menengah Indonesia yang telah dipraktikkan selama ini. Sejumlah persoalan menarik tersembul keluar, dan patut dikaji lebih lanjut.

Perlu kita catat terlebih dahulu beberapa kondisi yang membatasi praktek diskursif tentang kelas menengah Indonesia dalam dasawarsa ini. Kita ketahui *analisa kelas* tidak pernah dominan dalam kegiatan ilmiah para sarjana Indonesia. Minimnya analisa kelas itu punya sebab politis yang bersifat khas Orde Baru, dan sebab lain yang tidak langsung politis dan tidak khas Orde Baru. Pada masa ini analisa kelas tertekan oleh larangan yang bersifat memaksa entah secara legal-formal atau pun semi formal, informal, dan extra-legal. Ada faktor lain di luar sensor politik formal itu. Dalam sepanjang sejarahnya, induk ilmu pengetahuan dan sumber utama beasiswa (sekali-gus induk bantuan moneter, teknologi, militer, dan politik negara) kita terutama datang dari Belanda dan kemudian Amerika Serikat. Dari keduanya, kita menerima informasi, propaganda, beasiswa, buku teks yang mendominasi perpustakaan kita, konsultan, dosen tamu yang menjauhi analisa kelas dan Marxisme. Ini bukan sebuah konspirasi, disamping itu, kajian tentang Indonesia oleh para sarjana asing yang berkembang di kalangan mereka sendiri selama ini juga didominasi oleh mereka yang non-Marxis dan tak suka analisa kelas.<sup>23</sup>

23 Kasus Arief Budiman merupakan perkecualian yang langka dan unik. Tokoh ini dipengaruhi pemikiran Marxis setelah menempuh pendidikan dengan beasiswa di AS. Mungkin AS pemberi beasiswa terbesar bagi sarjana Indonesia, tapi jarang sekali sarjana Indonesia terdidik menjadi Marxis sesudah belajar di AS. Pengalaman Arief juga unik. Pada saat Arief bermahasiswa *kebetulan* intelektual AS dilanda demam Marxisme pada akhir 1960an dan awal 1970-an yang tak berumur panjang. Itu sebabnya, Marxisme Arief mungkin *khas* marxisme Amerika tahun 1970-an. Kalau saja Arief belajar di AS sepuluh ta-

17 Lihat uraian Robison, 1989b: 104.

18 Dalam Marxisme klasik memang dikenal adanya perbedaan *class-in-itself*, yakni kelas sebagaimana adanya, dan *class-for-itself*, kelas yang disadari oleh anggotanya, diorganisir dan digerakkan menjadi suatu kekuatan perjuangan kelas untuk mengubah masyarakat. Hal ini sesuai dengan presuposisi bahwa kenyataan obyektif bisa disadari oleh subyek bisa tidak, dan ia tetap ada walau tak disadari oleh si subyek.

19 Lihat catatan kaki 15.

20 Istilah *struktural(-is-me)* sendiri telah membenteng kerumitan yang membelit diskusi mutakhir di Indonesia. Sebagaimana halnya dengan *kelas*, istilah *struktural (-is-me)* dipakai dengan aneka makna secara sendiri-sendiri, artinya tanpa peduli dengan keberaneakan itu sendiri, dan pustaka klasik yang melahirkannya. Akibatnya, *strukturalisme* secara keliru seringkali diidentikkan dengan Marxisme, dan/atau dipertentangkan dengan *pendekatan kebudayaan*.

21 Lihat catatan kaki 7.

22 Dalam bidang kesusastraan pandangan itu menjelma dalam doktrin mutakhir *humanisme universal*. Paham *sastra kontekstual* merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap dominasi pandangan epistemologis demikian. Karena perdebatan epistemologis itu bersifat fundamental dan tidak kasatmata, hal ini banyak disalahpahami orang. Ada yang sedemikian jauh tersesat memahami perdebatan itu dan mendukungnya sebagai pertentangan kiblata nilai budaya *Barat* versus *Pribumi* dan dikait-kaitkan dengan Polemik Kebudayaan 1930-an.



Kondisi tersebut mempunyai beberapa konsekuensi penting. Pertama, walaupun telah muncul perbincangan yang seru dan fenomenal tentang kelas menengah Indonesia, kita belum menyaksikan berkembangnya analisa kelas yang serius atau tanda-tanda ke arah itu. Kelas menengah Indonesia diperbincangkan bukan sebagai kelas yang terlibat dalam suatu perjuangan ekonomi-politis sebagaimana dibicarakan dalam pustaka klasik. Kedua, Pustaka Indonesia menderita kemiskinan wawasan intelektual atau daya analitis ilmiah dibandingkan khsanah intelektual Indonesia pada bidang-bidang lain. Persoalannya mungkin bukannya tak ada sarjana Indonesia yang mahir dalam bidang ini. Bisa saja yang selama ini ikut berbincang belum mengeluarkan ilmunya secara maksimal,<sup>24</sup> dan ahli-ahli Indonesia yang lain belum mau atau berani membagikan ilmunya secara publik karena resiko politis yang sulit diduga batasnya. Kalaupun ada penulis semacam itu, adakah forum atau penerbit yang mendukungnya? Pustaka Indonesia tidak mewakili kualitas dan corak pergulatan para ilmu sosial Indonesia pada umumnya.

Ketiga, bukannya kelas atas atau kelas bawah yang telah dijadikan topik perbincangan pada dasawarsa ini. Pilihan jatuh pada kelas menengah, yakni kelas yang paling plin-plan, paling kabur, paling ragu dan oportunis, kelas yang tidak punya musuh dan sekutu yang tegas. Di saat ekstrem atas dan ekstrem bawah ditabukan seperti halnya ekstrem kiri dan kanan, orang hanya bisa menjelajahi ekstrem tengah. Kelas menengah Indonesia dibicarakan secara terpisah dari kelas-kelas yang lain.

Keempat, dengan gamblang dapat kita perhatikan bahwa perbincangan dalam Pustaka Indonesia selama ini didominasi oleh dan terutama ditujukan kepada kelas itu sendiri. Tapi jarang se-

kali kita dengar orang atau organisasi yang secara terbuka memproklamasikan diri sebagai *kelas menengah*.<sup>25</sup> Praktek diskursif kelas menengah Indonesia jadi menggelitik karena kelas menengah selalu dibicarakan secara evasif; dibiarkan sebagai pihak ketiga. Padahal, mereka yang terlibat dalam pembicaraan sama-sama tahu bahwa mereka adalah bagian penting dari kelas yang dibiarkan. Apa artinya semua ini?

Barangkali ini ada hubungannya dengan isi pernyataan-pernyataan mereka. Kita ingat, salah satu thema utama dalam Pustaka Indonesia adalah obsesi tentang peran progresif kelas menengah Indonesia. Kita ingat, keyakinan umum dan angan-angan — atau lebih tepatnya lagi: sebuah klaim bersama — bahwa jatidiri kelas menengah adalah pahlawan demokrasi dan kemajuan peradaban bagi seluruh masyarakat.<sup>26</sup> Menurut tata-krama yang lazim, klaim sehebat itu bisa dihormati jika menjadi acuan tentang pihak ketiga (dia/mereka) atau pertama majemuk (kita). Masalahnya, klaim itu tak punya wujud nyata yang dapat diamati sehari-hari. Ternyata kelas menengah Indonesia *menyeleweng* dari misi atau kodratnya yang *sejati*. Bagaimana praktek diskursif mereka memecahkan ini?

Pertama, mereka sadar klaim yang mengacu pada *kita* secara blak-blakan akan merugikan. Maka acuan ditujukan pada *dia/mereka*, dengan demikian *kita* terbebas dari beban pertanggung-jawab-

25 Ada perkecualian yang agak spektakuler. Dede Oetomo dengan tegar mengaku di depan publik tidak saja sebagai seorang homoseksual dan pimpinan organisasi homoseksual Indonesia, tetapi juga sebagai figur kelas menengah Indonesia. Menurut Dede, 'menjadi homoseksual merupakan pilihan bebas gaya hidup kelas menengah Indonesia, yang diibaratkannya dengan bermain tennis. Lihat *Tempo*, "Bila Gay Hanya Gaya, Gaya, Gaya ...", 10 Oktober 1987, hal. 26. Persoalannya, berapa dan sejauh mana orang (homoseksual atau heteroseksual) yang setuju dengannya berani menyatakan dukungan mereka secara publik dan terorganisir.

26 Ini mengingatkan kita pada praktek serupa yang dikerjakan oleh para seniman, baik Indonesia maupun asing; seniman sebagai genius yang nyentrik dan tak dapat dipahami masyarakatnya karena kejeniusan si seniman mendahului jamannya. Bukankah ini bagian dari praktek diskursif kelas menengah juga?

an atas *penyelewengan* kelas menengah ini. Kedua, banyak yang meratapi distorsi atau penyelewengan kelas menengah Indonesia dari kodratnya yang sejati. Ketiga, mereka menyalahkan pihak lain (sejarah kapitalisme di negeri ini yang *menyimpang*, atau terbentuknya negara yang terlalu kuat) sebagai penyebab distorsi atau penyelewengan itu.<sup>27</sup>

### Catatan Penutup

Ketika mulai mempersiapkan tulisan ini saya dihadapkan pada dua pilihan: (a) membagi ruang sempit yang tersedia di sini untuk sedikit mengkaji problematika dan sedikit menyusun usulan pemecahan, ataukah (b) menghabiskan seluruh ruangan ini untuk salah satu topik itu saja. Setelah memeriksa Pustaka Indonesia, saya memilih untuk hanya memusatkan perhatian pada diagnosis persoalan, dan lebih khusus lagi pada persoalan konseptual teoretik. Dengan demikian saya tak punya ilusi bahwa tulisan ini telah menuntaskan persoalan atau memuaskan pembaca. Namun, saya ingin menyimpulkan dua hal pokok dari uraian terdahulu untuk dipertimbangkan dalam kajian lebih lanjut.

Pertama, tentang konsep kunci dan kerangka teori. Menurut hemat saya pustaka klasik dan mutakhir yang masih terus berkembang-biak di luar Pustaka Indonesia menawarkan berbagai masukan yang terlalu berharga untuk diabaikan. Terdorong oleh beberapa dari pustaka itu, saya pribadi tengah

27 Dengan metoda dan interpretasinya sendiri, Emmanuel Subangun (1986) mempersoalkan praktek diskursif yang serupa. Menurut Subangun, timbulnya perbincangan seru tentang kelas menengah Indonesia belakangan ini merupakan ekspresi dari kegelisahan politik-ekonomi mereka.

menjelajahi penyusunan konsep kelas menengah sebagai kelas yang menguasai proses produksi legitimasi simbolik, biasanya mereka memiliki alat produksi untuk ini.<sup>28</sup> Artinya, pandangan ini tidak mengikuti konsepsi kelas yang didasarkan pada aspek konsumsi, tingkat penghasilan, profesi, atau gaya hidup. Tapi model itu juga berbeda dari konsep klasik Marxis yang mereduksi aspek simbolik sebagai refleksi tata ekonomi, atau mereduksi masyarakat hanya menjadi dua kelas yang saling bermusuhan.

Kedua, kalau pun banyak yang masih kabur tentang kelas menengah Indonesia, maka praktek diskursif mereka merupakan bahan kajian yang sangat nyata, indikator sebagian dari sosok mereka yang gamblang, peran sosial dan sumber modal otoritas mereka yang cukup jelas. Analisa diskursif yang saya ajukan masih jauh dari lengkap dan memuaskan, tetapi setidaknya-tidaknya saya berharap uraian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut. Dalam kaitan ini, topik diskursif lain yang perlu dimasukkan dalam agenda penelitian lebih lanjut tentang kelas menengah Indonesia ialah *seksualitas*. Kelas menengah kita mengutuk pornografi tapi gemar menyeminarkan seksualitas yang canggih dan berselera kelas, sebagaimana mereka suka Jazz dan senam kecantikan. Mereka anti kekerasan, tapi gemar gosip politik. Mereka baru sadar diri, dan sibuk dalam keasyikan ini sambil mengidentifikasi dan menata-diri.

28 Salah seorang pemikir yang banyak mempengaruhi dan berjasa dalam upaya eksploratif saya ini adalah sarjana terkemuka Perancis bernama Pierre Bourdieu. Daftar karya Bourdieu dan orang lain tentangnya bisa sepanjang Pustaka Indonesia terlampir. Perkenalan umum dan singkat dengannya dapat dijumpai pada edisi khusus tentangnya pada jurnal *Media, Culture and Society*, Vol. 2, No. 3, Juli 1980.

hun lebih awal atau lebih kemudian, mungkin sekali ia menjadi sarjana non-Marxis dan non-strukturalis seperti yang kini banyak dikritiknya.

24 Pembaca artikel Benny Subianto (1989) dengan mudah dapat memahami istilah kunci *strukturalis* yang ditulis Benny dimaksudkan sebagai euphemisme untuk *Marxisme*.